



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023**

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021–2026.

Akhirnya kami sampaikan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretaris, Seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Tg. Balai Karimun, 26 Februari 2024

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.196710031992031010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian di Kabupaten Karimun selama tahun 2021-2026 dengan Visi Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim Yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa"**, dengan **Misi Ketiga** : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia)" dan **Misi Kelima** : Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik) sementara Analisis akuntabilitas kinerja terhadap dua misi tersebut diatas dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran strategis, di mana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran dengan didukung 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun tahun 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 7.639.772.571,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 8.224.108.898,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.690.747,- atau 81 persen.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-6
I.1 Latar Belakang	I-6
I.2 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi	I-8
I.3 Isu Strategis	I-10
I.4 Permasalahan Utama (Strategis Issued)	I-11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-12
II.1 Visi	II-12
II.2 Misi	II-13
II.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD	II-13
II.4 Perjanjian Kinerja	II-14
II.5 Program dan Kegiatan	II-15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-20
III.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	III-20
III.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023	III-21
III.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu	III-21
III.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun	III-22
III.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan	III-23
III.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-27
III.7 Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian	

Kinerja	III-35
---------------	--------

III.6 Realisasi Anggaran	III-39
--------------------------------	--------

BAB IV PENUTUP	IV-43
--------------------------------	--------------

Lampiran :

- 1) Pengukuran Kinerja
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Matriks Rencana Strategis
- 4) Pohon dan Cascading Misi 3
- 5) Pohon dan Cascading Misi 5

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Tahun 2023	I-12
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Tahun 2023	II-15
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.....	II-15
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023	II-16
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat	III-21
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	III-22
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022	III-22
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dan Tahun Akhir Rensta Tahun 2026	III-23
Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja	III-24
Tabel 3.6 Analisis Penggunaan Sumber Daya	III-29
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja	III-36
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran	III-40

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5), membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menangani urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dengan urusan wajib non pelayanan dasar dan di bidang perindustrian dengan urusan pilihan.

Sebagai bentuk penjabaran dari asas akuntabilitas yang menuntut pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan kepada seluruh lapisan masyarakat, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagai salah satu perangkat daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk menggambarkan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah khususnya yang berkaitan pencapaian sasaran, tujuan, target dan indikator Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun selama kurun waktu tahun 2023, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan kepada Bupati.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2021 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
3. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
4. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijakan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5), yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98), yakni :

A. Tugas

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

B. Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
2. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

C. Uraian Tugas

Uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yakni :

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; dan
- d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian yang ditugaskan oleh atasan.

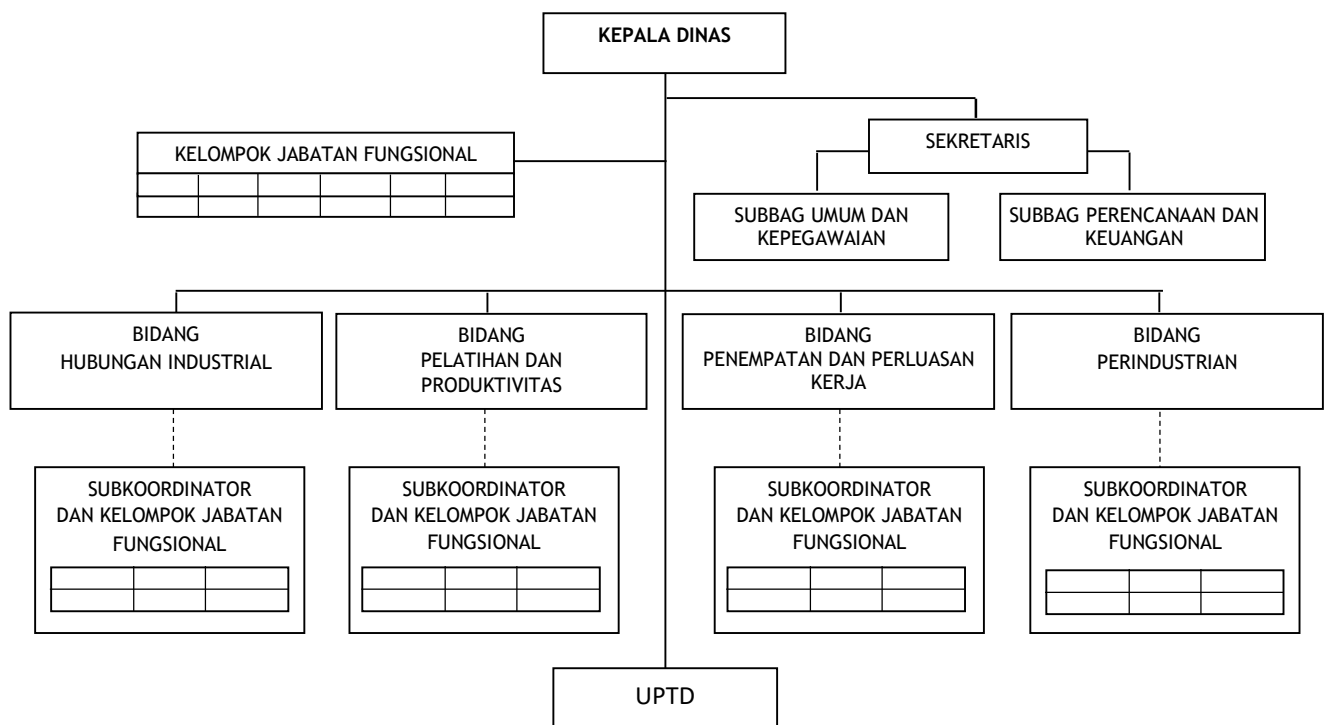
D. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Hubungan Industrial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

6. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun



I.3 ISU STRATEGIS

Suatu kondisi menjadi isu strategis disebabkan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Program kegiatan adalah upaya yang ditempuh dalam mengantisipasi isu strategis, sehingga tujuan Dinas dapat tercapai dengan maksimal. Adapun isu strategis yang menjadi penentu/berpengaruh dalam pencapaian tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah :

1. Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM tenaga kerja;

2. Meningkatkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
3. Meningkatkan penempatan tenaga kerja;
4. Menciptakan Kesempatan kerja dengan menumbuhkan wirausahabaru seperti Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
5. Menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk kesejahteraan dan perlindungan pekerja pengusaha;
6. Meningkatkan Pelaksanaan Pengelolaan untuk menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah

I.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah selama Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Tahun 2023

PERMASALAHAN	
Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Perindustrian
1. Masih Relatif Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus pada bidang-bidang usaha. 2. Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah. 3. Masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan norma ketenagakerjaan sesuai aturan. 4. Masih rendahnya komitmen perusahaan untuk merekrut dan melindungi para tenaga kerja wanita dan penyandang disabilitas. 5. Masih banyaknya perusahaan yang tidak menginformasikan lowongan pekerjaan. 6. Kurangnya pengetahuan pencaker dalam penggunaan teknologi.	1. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian Keterbatasan sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian terutama terjadi pada IKM sehingga tidak dapat memberikan output yang maksimal. 2. Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan yang tersedia Permasalahan permodalan juga terutama dialami oleh IKM dalam pengembangan usaha, terutama untuk pemenuhan alat produksi. 3. Rendahnya kerjasama (kemitraan) antara pelaku IKM dengan perusahaan- perusahaan berskala besar khususnya BUMN dan swasta nasional lainnya. 4. Ketersediaan daya listrik untuk industri, Jumlah ketersediaan daya listrik untuk kebutuhan industri belum memadai. disebabkan belum adanya penambahan daya PLN yang dikhususkan untuk industri, sedangkan pihak swasta (PT. SOMA) baru akan beroperasi pada tahun 2022 dengan total daya diperkirakan mencapai 100 MW.

BAB II

P

ERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra).

Sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah dalam bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun disusun selaras dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja RI, Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Renstra Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara simultan sesuai proses tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang diawali pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, dan Forum SKPD. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dan stakeholder yang berkaitan dengan urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

II.1 VISI

Visi Pembangunan Kabupaten Karimun selama periode 2021-2026 yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”.**

II.2 MISI

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Karimun selama periode 2021-2026, maka Misi pembangunan Kabupaten Karimun sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal (Berkeadilan Dalam Bidang Ekonomi)
- 2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan Dalam Infrastruktur)
- 3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia)
- 4) Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Berkeadilan Dalam melestarikan lingkungan hidup)
- 5) Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik)

Sebagaimana dengan misi tersebut di atas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun mendapatkan amanah untuk menjalankan misi sebagai berikut :

Misi ketiga : “Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia)”

Misi kelima : Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik)

Dari misi ketiga dan kelima inilah yang kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran dari proses pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di Kabupaten Karimun.

II.3 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun di RPJMD Periode Tahun 2023, serta pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Periode 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Tahun 2023

Misi 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia)					
No	Urusan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berikaitan Dengan Pelayanan Dasar				
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,45 %
				2. Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	91,50 %
2	Urusan Pemerintahan Pilihan				
B	Urusan Pemerintahan Pilihan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	1. Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	0,66 %

Misi 5 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Unggul (Bekeadilan Dalam Pelayanan Publik)			
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.50

II.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,50 %
		2. Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	91,50 %

2	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	3. Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	0,50 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerind	4. Nilai Akip	73 Nilai

II.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Karimun yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 serta Program Penunjang sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					7,370,638,841
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	4,922,662,879
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen / Laporan	2 Dok / 1 Lap	113,544,346
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	53,595,000
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	49,899,346
		3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	10,050,000
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	3,541,297,096
		4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	364	3,465,877,096

		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Dokumen	1	75,420,000
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	6	204,640,006
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1,986,000
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10,906,925
		8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	7,269,356
		9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4,876,500
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	10,000,000
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	169,601,225
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	431,500,000
		12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	25,000,000
		12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	406,500,000
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	3	83,815,400

		13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	56,997,000
		14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	21,948,400
		15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	4,870,000
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	56,45%	1,850,000,000
	6	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	30%	1,800,000,000
		16	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	109	1,800,000,000
	7	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	50,000,000
		17	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	50,000,000
3	Program Penempatan Tenaga Kerja			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen		344,999,173
				Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	Rupiah		
	8	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja	Dokumen	1	244,999,508
		18	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	30	94,999,914

		19	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	30	149,999,594
	9	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja	Perusahaan	5	49,999,757
		20	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	49,999,757
	10	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah TKA yang Mendapatkan Penerbitan Perpanjangan IMTA	Orang	111	49,999,908
		21	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	Laporan	1	49,999,908
4	Prpgram Hubungan Industrial			Penyelesaian kasus yang difasilitasi	Kasus	5	419,999,515
	11	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP	Perusahaan	24	269,999,665
				Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB	Perusahaan	4	
		22	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	269,999,665
	12	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Laporan	1	149,999,850
		23	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	149,999,850

	Urusan Pemerintahan Pilihan					
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					649,977,035
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dokumen	2	649,977,035
	13	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	2	599,977,807
		24 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	109,999,303
		25 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	489,978,504
6	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Jumlah Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1	49,999,228
	14	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	49,999,228
		26 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	49,999,228
			TOTAL			7,639,772,571

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah

5	≤ 50%	Sangat Rendah
---	-------	---------------

III.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61.50	64.79	105.35
		Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Persen	97.75	95.79	97,99
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0.50	0,63	126
3.	Meningaknya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	Nilai	73 Nilai	Belum Diterbitkan Inspektorat	

Pada tabel diatas sesuai Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Sasaran dan 4 (empat) Indikator, untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Disnakerin dengan indikator Nilai Akip belum diterbitkan Inspektorat maka rata-rata dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator sebesar 109,78 persen.

III.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun lalu dengan Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022.

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

1.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61,21	60,46	98,77	61.50	64.79	105.35
		Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Persen	91,45	99,60	108,91	97.75	95.79	97,99
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,66	0,61	92,42	0.50	0,63	126
3.	Meningaktnya Akuntabilitas Kinerja Disnakarin	Nilai Akip	Nilai	73 Nilai	50.08 Nilai	68,60%	73 Nilai	Belum Terbit	

III.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dan Tahun Akhir Renstra Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	64,79	65,27	99,26%
		Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Persen	95,79	91,65	104,52%
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,63	0,67	94,03%
3.	Meningaktnya Akuntabilitas Kinerja Disnakarin	Nilai Akip	Sudah jelas	50,89	73	69,71%

III.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan :

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Rumus	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang telah dilakukan
1.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Angkatan Kerja [dibagi] Jumlah Penduduk Usia Kerja [dikali] 100 persen	Persen	61,50	64,79	105,35	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah/daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karimun pada tahun 2023 jumlah angkatan kerja sebanyak 126.421 Orang, sementara Penduduk Usia Kerja sebanyak 195.132 orang, maka TPAK sesuai rumus : <i>Jumlah Angkatan Kerja</i> (126.421 Orang) <i>[dibagi]</i> <i>Jumlah Penduduk Usia Kerja</i> (195.132 Orang) <i>[dikali]</i> 100 Persen = 64,79 Persen	
		Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Jumlah Seluruh tenaga kerja [dibagi] Jumlah Tenaga Kerja Lokal [dikali] 100 persen	Persen	97,75	96,18	98,39	Pada Tahun 2023 (Berdasarkan wajib lapor tahun 2023 Disnakerin) jumlah Tenaga Kerja Lokal sebanyak 12.525 orang, dan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 498 orang, maka jumlah seluruh tenaga kerja sebanyak 13.023 orang, maka penghitungan sebagaimana rumus : <i>Jumlah Tenaga Kerja Lokal</i> (12.525 Orang) <i>[dibagi]</i> <i>Jumlah Seluruh Tenaga Kerja</i> (13.023) <i>[dikali]</i> 100 persen = 96,18 persen	

2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah IKM [dibagi] Jumlah Penduduk [dikalikan] 100 persen	Persen	0.50	0,63	126	Sampai dengan tahun 2023 pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebanyak 1.690 IKM, sementara Jumlah Penduduk pada tahun 2023 berjumlah 270.121 jiwa (Sumber : www.dukcapil.kemendagri.go.id . Diakses tanggal 9 Februari 2024) maka perhitungan sesuai formula bahwa Jumlah IKM (1.690 IKM) [dibagi] Jumlah Penduduk (270.121 jiwa) [dikalikan] 100 persen = 0,63 persen	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip		Nilai	73 Nilai	Belum Terbit	-		

Sebagaimana tabel diatas dapat kami jelaskan kembali bahwa :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Peningkatan TPAK juga sangat berpengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka, yang mana pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten menurun sebesar 6,02 persen menurun dibanding pada tahun 2022 sebesar 6,87 persen. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karimun perekonomiannya semakin membaik.

Membuka kesempatan Kerja di Kabupaten Karimun sehingga perusahaan dapat menyerap tenaga kerja dalam permintaan yang besar, karna semakin tinggi angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.

Peningkatan TPAK dapat juga dilihat pada tahun lalu dan tahun ini, dimana pada tahun 2022 jumlah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan sebanyak 130 lowongan (*LPPD Disnakerin 2022*), sementara pada tahun 2023 jumlah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan sebanyak 215 lowongan (*LPPD Disnakerin 2023*).

2. Rasio Tenaga Kerja Lokal terhadap seluruh Tenaga Kerja

Pada dasarnya, Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah segenap upaya agar memajukan serta meningkatkan penanaman uang dan modal atau investasi, bertukar

pengetahuan dalam teknologi (Transfer Technology), dan bertukar kemampuan dalam skill (Transfer Skill) kepada Tenaga Kerja dalam negeri yang menjalin kerjasama antar negara. Oleh karenanya, penanam uang dan modal atau investor di Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan dasar penetapan putusan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah untuk memberi perlindungan tenaga kerja dengan menjamin hak penting buruh dan pekerja, kesamaan dalam mendapatkan pekerjaan serta perlakuan tidak diskriminasi terhadap dasar lainnya guna menciptakan kesejahteraan bagi buruh, pekerja, dan keluarga dengan tetap melihat perkembangan serta perkembangan dunia investasi dan usaha.

3. Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk

Dalam membangun IKM yang mampu bersaing seiring dengan peningkatan perekonomian dan pengurangi pengangguran ada beberapa modal yang harus disiapkan, baik disiplin pelaku IKM itu sendiri maupun pemerintah diantaranya :

1. *Human Capital* (Modal Manusia) sering juga disebut dengan modal sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat penting dipersiapkan untuk membangun IKM yang dunia usaha dan yang sudah sangat kompetitif.
2. *Phsyical Capital* adalah pentingya modal fisik bagi berkelanjutan usaha IKM, meliputi ketersediaan infrastruktur dasar, seperti ketersediaan transportasi, air bersih, alat komunikasi serta peralatan produksi lainnya.
3. *Social Capital* atau modal sosial yaitu bagaimana pelaku IKM juga dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan, melayani customer dengan baik dengan selalu meningkatkan mutu dan pelayanan.
4. *Financial Capital*, bagaimana mengatur keuangan, menambah permodalan untuk perluasan usaha, akses ke perbankan termasuk penting untuk pengembangan IKM.
5. *Natural Capital*, bagaimana pelaku IKM mampu beradaptasi dengan lingkungan usaha dimana dia melakukan aktivitas usaha.

Beberapa komponen diatas merupakan faktor-faktor IKM tetap tumbuh dan berkembang, dengan berkembangnya IKM otomatis perekonomian meningkat dan pengangguran akan menurun.

Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Karimun yang tidak terlepas dari pentingnya dukungan Pemerintah Kabupaten Karimun terus melakukan pergerakan upaya untuk pengembangan IKM diantaranya :

1. Pengembangan IKM diupayakan sejalan dengan penguatan struktur industri dengan memperbesar keterkaitan antara industri besar dengan IKM, melalui insentif kepada industri besar agar lebih melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya;
2. Meningkatkan akses IKM terhadap sumber pembiayaan dengan mendorong perbankan menciptakan sistem pembiayaan yang lebih fleksibel dan mengakomodir sifat IKM.
3. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui *procurement* dan pemasaran bersama.
4. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak paten bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
5. Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
6. Peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendampingan, magang dan studi banding;
7. Peningkatan teknologi melalui restrukturisasi mesin peralatan IKM;
8. Peningkatan kualitas produk melalui fasilitasi penerapan standar produk-produk IKM.

4. Nilai AKIP

Adapun Nilai Akip Tahun 2023 belum diterbitkan Inspektorat

III.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome	
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2022	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5.067.484.000	4.370.290.516	481 Orang Peserta	433 Orang Peserta	20 Persen Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	17 persen Jlh tenaga kerrja yg mengikuti pelatihan 433 orang [dibagi] jlh yg mendaftar 2463 orang [dikali] 100 persen
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	42.000.000	40.461.700	1 Laporan	1 Laporan	47,63% Persentase perusahaan yang menerapkan prog peningkatan produktivitas	47,22% Jlh Perusahaan yg menerapkan Prog Peningkatan Produktivitas 34 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan 72 Perusahaan {dikali] 100 persen
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	36.000.000	35.776.500	1 Laporan	1 Laporan	100 Lowongan yang tersedia	133 Lowongan yang tersedia
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	49.584.000	49.507.126	1 Laporan	1 Laporan	30 Orang Izin Perpanjangan TKA	22 Orang Izin Perpanjanagn TKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	265.434.000	264.923.564	1 Laporan	1 Laporan	35,22%	21,34%
							1. Persentase Perusahaan yang telah memiliki PP	1. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 35 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 179 Perusahaan [dikali] 100 persen
							85%	148,78%
							2. Persentase perusahaan yg telah menyusun struktur skala upah	2. Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun Struktur Skala Upah : 61 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) : 41 Perusahaan [dikali] 100 persen
							100%	100%
							3. Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	3. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n : 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikali] 100 persen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	151,490,000	149,240,000	1 Laporan	1 Laporan	2,15% Persentase Perusahaan yang Berselisih	2,17% (Jumlah perusahaan yang berselisih (8 Perusahaan) [dibagi] Jumlah Perusahaan Wajib Lapor tahun 2022 (369 Perusahaan) [dikali] 100 Persen = 2,17 persen
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	54,000,000	54,000,000	1 Doku Hasil Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	1 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	1 Dokumen	1 Dokumen Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	740,000,000	669,922,635	105 Orang Jumlah Calon Wirausaha yang mendapatkan pelatihan	105 Orang Jumlah Calon Wirausaha yang mendapatkan pelatihan	0,60 % Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	0,56 % Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan Pembinaan (9 kelompok Pengrajin) [dibagi] Jumlah kelompok pengrajin (1621 Kelompok Pengrajin) [dikali] 100 persen
2023	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,445,100,249,-	1,267,690,409,-	119 Orang Peserta	109 Orang Peserta	30 Persen Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	49,32 persen Jumlah peserta yg ikut pelatihan 109 orang [dibagi] jlh yg mendaftar 221 orang [dikali] 100 persen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	49,000,000,-	40,861,623,-	1 Laporan	1 Laporan	45 Persen Persentase perusahaan yang menerapkan prog peningkatan produktivitas	40 Persen Jumlah Perusahaan yg menerapkan Prog Peningkatan Produktivitas 16 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan 40 Perusahaan {dikali} 100 persen
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	244,999,508	240,267,090	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Wirausaha	100 Persen Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis wirausaha baru (TKM,TTG) 60 orang [dibagi] Jumlah yang mendaftar pelatihan berbasis wirausahabaru (TKM,TTG) 60 Orang [dikali] 100 persen
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	51,199,357,-	40,260,139,-	1 Laporan	1 Laporan	150 Jumlah Lowongan yang tersedia	215 Jumlah Lowongan yang tersedia
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	51,188,367	41,717,183	1 Laporan	1 Laporan	150 Orang Izin perpanjangan TKA	102 Orang Izin perpanjangan TKA
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk	321,249,665	185,907,513	1 Laporan	1 Laporan	35,22% 1. persentase perusahaan yang telah memiliki PP	33,33% 1. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 47 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 141

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

		Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota						Perusahaan [dikali] 100 persen
							95% 2. Persentase perusahaan yg telah menyusun struktur skala upah	137,04% 2. Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun Struktur Skala Upah : 74 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) : 5 4 Perusahaan [dikali] 100 persen
							100 % 3. Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	100% 3. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n : 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikali] 100 persen
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	140,999,850	101,146,850	1 Laporan	1 Laporan	3% Persentase Perusahaan yang Berselisih	2,93% (Jumlah perusahaan yang berselisih (9 Perusahaan) [dibagi] Jumlah Perusahaan Wajib Laport tahun 2022 (307 Perusahaan) [dikali] 100 Persen = 2,93 persen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

	Program Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	139,998,921	201,657,850	1 Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	1 Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	1 Dokumen	1 Dokumen Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	663,471,908	117,386,650	30 Orng Jumlah Calon Wirausaha yang mendapatkan pelatihan	30 Orang Jumlah Calon Wirausaha yang mendapatkan pelatihan	4,50 % Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	4,38 % Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan Pembinaan (74 kelompok Pengrajin) [dibagi] Jumlah kelompok pengrajin (1690 Kelompok Pengrajin) [dikalikan] 100 persen
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	49,999,228	49,944,586	1 Dokumen Dokumen Hasil Fasilitas Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	1 Dokumen Hasil Fasilitas Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	1 Dokumen	1 Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota

Sebagaimana tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya jika dibandingkan pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia pada kegiatan :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi lebih besar anggaran tahun 2022 dibanding tahun 2023 hal ini dikarenakan adanya perhatian pemerintah daerah untuk memberikan anggaran pelatihan sehingga realisasi output sebanyak 433 orang sedangkan pada tahun 2023 realisasi output sebanyak 109 orang dengan efisiensi sumber daya terjadi di tahun 2022 yang mana lebih banyak realisasi outputnya.
2. Kegiatan pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota efisiensi sumber daya ada di tahun 2022 karena persentase realisasi outputnya lebih tinggi dibanding tahun 2023.
3. Untuk kegiatan pengelolaan Informasi pasar kerja efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2023 lebih besar dibanding pada tahun 2022 yang disesuaikan dengan meningkatnya perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan juga data BPS menunjukkan ada penurunan tingkat pengangguran terbuka antara tahun 2022 dan 2023.
4. Untuk kegiatan penerbitan IMTA yang bertujuan untuk menambah retribusi daerah sehingga efisiensi sumber daya untuk tahun 2023 lebih besar dibanding tahun 2022 dengan anggaran yang diperoleh dari data-data TKA.
5. Untuk Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota efisiensi penggunaan sumber daya realisasi anggaran di tahun 2022 lebih tinggi dibanding pada tahun 2023, sementara sebaliknya outcome kegiatan lebih besar di tahun 2023 dibanding pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 perusahaan yang telah memiliki PP sebanyak 35 Perusahaan dan Perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah sebanyak 61 perusahaan, sementara di tahun 2023 perusahaan yang telah memiliki PP sebanyak 47 perusahaan dan perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah sebanyak 74 perusahaan.
6. Untuk Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota efisiensi penggunaan sumber daya dengan realisasi anggaran di tahun 2022 lebih besar dibanding tahun 2023, dan outcome lebih tinggi di tahun 2023 dibanding 2022.

7. Untuk Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri efisiensi penggunaan sumber daya di tahun 2023 lebih besar di banding tahun 2022
8. Untuk Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat efisiensi penggunaan sumber daya di tahun 2022 lebih besar dibanding tahun 2023, disesuaikan juga dengan outpnya yakni jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan berbasis wirausaha lebih besar di tahun 2022 dibanding tahun 2023.
9. Untuk Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) efisiensi penggunaan sumber daya hanya di tahun 2023.

III.7 Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja atas sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	108,79%			
		1. Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal yang Kompetitif	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	I. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100,22%
			2. Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan UnitKompetensi	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	164.4%
				2. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan prog peningkatan produktivitas	88.89%
				II. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	98,99%
					Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	Rp.1.176.725.500,-

				1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Wirausaha	100%
				2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan yang tersedia	143.33%
				3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Izin perpanjangan TKA	68%
				III. Program Hubungan Industrial	Penyelesaian kasus yang difasilitasi	200%
					Persentase Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan (PP,PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit)	96,08%
				1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasidalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	persentase perusahaan yang telah memiliki PP	94.63%
					Persentase perusahaan yg telah menyusun struktur skala upah	144.25%
					Persentase perusahaan telah memiliki PKB	100%
				2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Berselisih	85,91%
2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita				
	1. Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap	126 %	I. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Inudstri Kecil dan Menengah (IKM)	90,67 %

		Jumlah penduduk		1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	97,33 %
				II. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1 Dokumen (Informasi industri secara lengkap dan terkini)	1 Dokumen (Informasi industri secara lengkap dan terkini)
				1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen (Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota)	1 Dokumen (Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota)

Sebagaimana tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk mendorong pemasyarakatan dan meningkatkan kegiatan pelatihan kerja dan aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja agar tersedianya tenaga kerja yang **berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi** baik dipasar kerja dalam negeri maupun luar negeri.

Indikator Program ini Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dengan formula ***Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi [dibagi] jumlah tenaga kerja keseluruhan [dikali] 100 persen***, dengan formula tersebut maka pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebanyak 2326 orang, sementara jumlah tenaga kerja keseluruhan sebanyak 4342 orang, maka terealisasi sebesar 53,57 persen dengan capaian 100.22 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 53,45 persen.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk :

- Mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
- Mengurangi pengangguran dan setengah penganggur melalui perluasan kesempatan kerja diberbagai bidang usaha dan meningkatkan peranan devisa dari

pengiriman tenaga kerja keluar negeri dalam upaya memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha.

Indikator Program ini terbagi 2 (dua) yakni :

1. Indikator Pertama Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan dengan formula ***Jumlah pencaker/pencari kerja yang ditempatkan [dibagi] jumlah pencaker yang mendaftar [dikali] 100 persen***, maka sesuai formula bahwa jumlah pencaker/pencari kerja pada tahun 2023 sebanyak 394 orang, sementara yang ditempatkan sebanyak 744 orang, dan terealisasi sebesar 52,96 persen, dengan capaian sebesar 98,99 persen dari target yang ditetapkan sebesar 53,50 persen. (Target PK Ibuk Ayu 53,50% Terealisasi 52,96% Capaian 98,99)
2. Indikator Kedua yakni Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) dengan target sebesar Rp. 1.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp.1.176.725.500.

3. Program Hubungan Industrial.

Program Hubungan Industrial bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, dan dinamis antara pelaku proses produksi tersebut, dengan hubungan industrial yang dibangun, maka akan tercipta kondisi yang aman, harmonis, serasi, dan sejalan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Selanjutnya, perusahaan juga dapat terus meningkatkan produktivitas dalam usahanya dan pihak lain akan mendapatkan kesejahteraan.

Indikator Program ini adalah ***Penyelesaian Kasus yang Difasilitasi*** (Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan industrial), untuk itu jumlah keseluruhan kasus yang tercatat sebanyak 9 kasus, sementara kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh mediator hubungan industrial sebanyak 3 kasus, maka penghitungan hasil realisasi yakni *target [kali] 2 [dikurang] realisasi [dibagi] target [dikali] 100 persen*, untuk itu sesuai penghitungan tersebut yakni : target (3) [dikali] 2 = 9 [dikurangi] realisasi = 3 [dibagi] target [(3) [dikali] 100 persen = 200 persen.

4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini bertujuan mendorong kemampuan para perajin yang sebagian besar merupakan industri kecil dan menengah agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di tengah perubahan pasar yang cukup fluktuatif saat ini, dengan indikator

Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah baik di dalam maupun luar negeri.

Indikator Program tersebut diatas dengan formula jumlah industri kecil dan menengah tahun ini [dikurang] jumlah industri kecil dan menengah tahun lalu [dibagi] jumlah industri kecil dan menengah tahun lalu [dibagi] 100 persen, maka jumlah IKM tahun ini sebanyak 1690 IKM [dikurangi] IKM tahun lalu sebanyak 1621 IKM = 90 IKM dibagi IKM tahun lalu 1621 IKM [dikali] 100 persen, maka hasil/realisasi sebesar 4,08 persen, dengan capaian sebesar 90,67 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,5 persen.

III.8 Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 3 (Tiga) sasaran strategis, maka terdapat 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		7,370,638,841	6,439,144,982	87.36
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4,922,662,879	4,521,294,175	91.85
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109,365,346	82,982,283	75.88
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55,662,500	35,559,457	63.88
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44,152,846	40,722,826	92.23
		3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,550,000	6,700,000	70
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,884,983,482	3,715,520,829	95.64
		4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,794,479,482	3,649,532,829	96.18
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90,504,000	65,988,000	72.91
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346,953,651	226,866,663	65.39
		6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,986,000	1,983,900	99.89

		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120,660,070	71,777,000	59.49
		8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,269,356	7,226,000	99.40
		9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,137,000	5,137,000	100.00
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	9,835,000	98.35
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201,901,225	130,907,763	64.84
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		496,720,000	437,527,500	88.08
		12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,820,000	23,577,500	87.91
		12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469,900,000	413,950,000	88.09
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		84,640,400	58,396,900	69
		13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54,167,000	40,575,900	74.91
		14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18,503,400	5,901,000	31.89
		15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,970,000	11,920,000	99.58
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			1,641,940,573	1,308,552,032	79.70
	6	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		1,592,940,573	1,267,690,409	79.58
		16	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,445,100,249	1,267,690,409	87.72
		17	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	147,840,324	0	0.00
	7	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		49,000,000	40,861,623	83.39
		18	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	49,000,000	40,861,623	83.39
3	Program Penempatan Tenaga Kerja			343,785,874	322,244,412	93.73
	8	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		241,398,150	240,267,090	99.53
		19	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	94,999,914	94,414,690	99.38
		20	Perluasan Kesempatan Kerja	146,398,236	145,852,400	99.63
	9	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		51,199,357	40,260,139	78.63

		21	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	51,199,357	40,260,139	78.63
	10	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		51,188,367	41,717,183	81.50
		22	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51,188,367	41,717,183	81.50
4	Program Hubungan Industrial			462,249,515	287,054,363	62.10
	11	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		321,249,665	185,907,513	57.87
		23	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	321,249,665	185,907,513	57.87
	12	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		140,999,850	101,146,850	71.74
		24	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	140,999,850	101,146,850	71.74
	Urusan Pemerintahan Pilihan					
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			853,470,057	251,602,436	29.48
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			803,470,829	201,657,850	25.10
	13	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		803,470,829	201,657,850	25.10
		25	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	139,998,921	84,271,200	60.19
		26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	663,471,908	117,386,650	17.69
6	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			49,999,228	49,944,586	100
	14	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		49,999,228	49,944,586	100
		27	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	49,999,228	49,944,586	100
			TOTAL	8,224,108,898	6,690,747,418	81

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini dimaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. Selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun 2022-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dapat dinyatakan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian 2 (dua) sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja, sasaran ke 1 (satu) terdapat 2 (dua) Indikator, yang mana sasaran pertama capaian kinerja sebesar 105,35% atau kategori sangat tinggi, sementara yang kedua dengan capaian sebesar 97,99% atau kategori sangat tinggi, sasaran kedua hanya 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja sebesar 126% dengan mencapai kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Ketepatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, disertai dengan tindaklanjut atas rekomendasi hasil review terhadap kinerja Dinas;

2. Komitmen dan integritas pemimpin bersama jajarannya dalam bekerjasama dan bekerja bersama-sama, dengan memaksimalkan perannya dalam mewujudkan tujuan/sasaran Dinas;
3. Intensitas koordinasi, konsultasi dan komunikasi stakeholders dalam membangun sinergitas tercapainya sasaran Dinas berdasarkan porsi masing-masing;
4. Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi, sebagai sarana pendukung kegiatan yang lebih efektif dan efisien.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Berupaya dan berkomitmen, berkonsekuensi serta berkolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia birokrasi untuk menambah pengetahuan dan kecakapan individu birokrat bukan saja melalui bimtek atau pelatihan tetapi memperbaiki system kerja yang memungkinkan kecakapan individu.
2. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai.
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dalam mencapai sasaran strategis yang disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 disusun melalui pengukuran indikator kinerja Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam dokumen-dokumen perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja. Berikut Realisasi pencapaian target sebagaimana di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator	Rumus	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
					Realisasi	Target	Realisasi		
1.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Penduduk Bekerja [dibagi] jumlah angkatan kerja [dikali] 100 persen	Persen	60,46	61.50	64,79	65,27	99,26%
		Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	JumlahTenaga Kerja Lokal [dibagi] Jumlah Tenaga Kerja [dikali] 100 persen	Persen	99,60	97.75	95,79	91,65	104,52%
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk [dibagi] jumlah IKM [dikali] 100 persen	Persen	0,61	0.50	0,63	0,67	94,03%
3.	Meningaktnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	<i>Sudah jelas</i>	<i>Nilai</i>	50.08	73	<i>Belum Terbit</i>	73	69,71%



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN POROS GEDUNG B (GUNUNG PAPAN) LANTAI II
TANJUNG BALAI KARIMUN

Website : <http://www.dinakerprind.info>

Kode Pos : 29631
Email : dinakerind.karimun@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AUNUR RAFIQ
Jabatan : BUPATI KARIMUN
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KARIMUN

H. AUNUR RAFIQ

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN**

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal yang kompetitif	1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,50%
		2.	Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	97,75 %
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	3.	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	0,50%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	4.	Nilai Akip	73 Nilai

PROGRAM		ANGGARAN	
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.374.796.848,-
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	1.850.000.000,-
3.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	344.462.883,-
4.	Hubungan Industrial	Rp.	419.999.515,-
5.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	599.977.807,-
6.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	49.999.228,-
TOTAL ANGGARAN		Rp.	7,639,772,571,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2023

BUPATI KARIMUN,


H. AUNUR RAFIQ

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN**

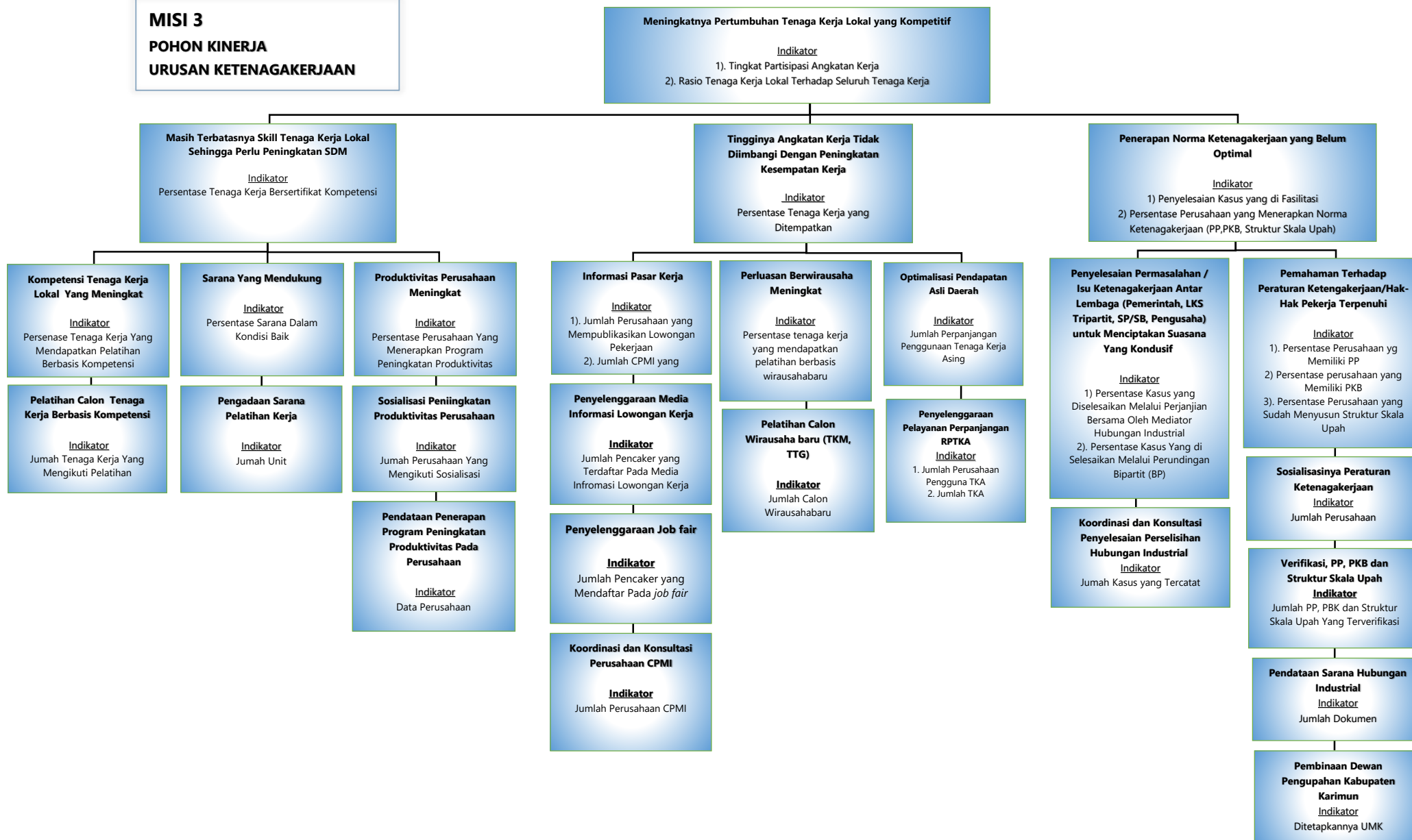

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc

**RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
A	Urusan Perindustrian								
1.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		PDRB Perkapita	Jt (RP)	62,74	65,94	69,32	72,86	76,59
		Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,66 sesuai PK	0,66	0,66	0,67	0,67
B	Urusan Ketenagakerjaan								
2.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,90	6,60	6,35	6,15	5,80
		Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61,21 sesuai PK	62,45	63,71	64,17	65,27
			Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Persen	91,45 sesuai PK	91,50	91,55	91,60	91,65
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan		Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,01	3,50	3,51	3,55	4,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	Nilai	73,00 Sesuai PK	73,00	73,00	73,00	73,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

MISI 3 POHON KINERJA URUSAN KETENAGAKERJAAN



MISI 3 CASCADING URUSAN KETENAGAKERJAAN

RPJMD

MISI 3 :

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa

TUJUAN RPJMD :
3.2. Menurunkan Angka Kemiskinan
Indikator
Angka Kemiskinan

SASARAN RPJMD :
3.2.3. Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah
Indikator
Tingkat Pengangguran Terbuka

TUJUAN
Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah
Indikator
Tingkat Pengangguran Terbuka

RENSTRA

SASARAN
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal yang Kompetitif
Indikator
1). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2). Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja

Meningkatnya SDM Tenaga Kerja Lokal
Indikator
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Meningkatnya Kesempatan Kerja
Indikator
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan

Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis
Indikator
1) Penyelesaian Kasus yang di Fasilitas
2) Persentase Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan (PP,PKB, Struktur Skala Upah)

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja lokal
Indikator
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja
Indikator
Persentase Sarana Dalam Kondisi Baik

Meningkatnya Produktivitas Perusahaan
Indikator
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas

Tersedianya Informasi Pasar Kerja
Indikator
1). Jumlah Perusahaan yang Mempublikasikan Lowongan Pekerjaan
2). Jumlah CPML yang Dipekerjakan di Luar Negeri

Meningkatnya Perluasan Kerja
Indikator
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis wirausahabaru

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Indikator
Jumlah Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis
Indikator
1) Persentase Kasus yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama Oleh Mediator Hubungan Industrial
2). Persentase Kasus Yang di Selesaikan Melalui Perundingan Bipartit (BP)

Terciptanya Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan
Indikator
1). Persentase Perusahaan yg Memiliki PP
2) Persentase perusahaan yang Memiliki PKB
3). Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala

Pelatihan Calon Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi
Indikator
Jumlah Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan

Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
Indikator
Jumlah Unit

Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Perusahaan
Indikator
Jumlah Perusahaan Yang Mengikuti Sosialisasi

Penyelenggaraan Media Informasi Lowongan Kerja
Indikator
Jumlah Pencaker yang Terdaftar Pada Media Informasi Lowongan Kerja

Pelatihan Calon Wirausaha baru (TKM, TTG)
Indikator
Jumlah Calon Wirausahabaru

Terselenggaranya Pelayanan Perpanjangan RPTKA
Indikator
1. Jumlah Perusahaan Pengguna TKA
2. Jumlah TKA

Koordinasi dan Konsultasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Indikator
Jumlah Kasus yang Tercatat

Sosialisasinya Peraturan Ketenagakerjaan
Indikator
Jumlah Perusahaan

Verifikasi, PP, PKB dan Struktur Skala Upah
Indikator
Jumlah PP, PKB dan Struktur Skala Upah Yang Terverifikasi

Pendataan Penerapan Program Peningkatan Produktivitas Pada Perusahaan
Indikator
Data Perusahaan

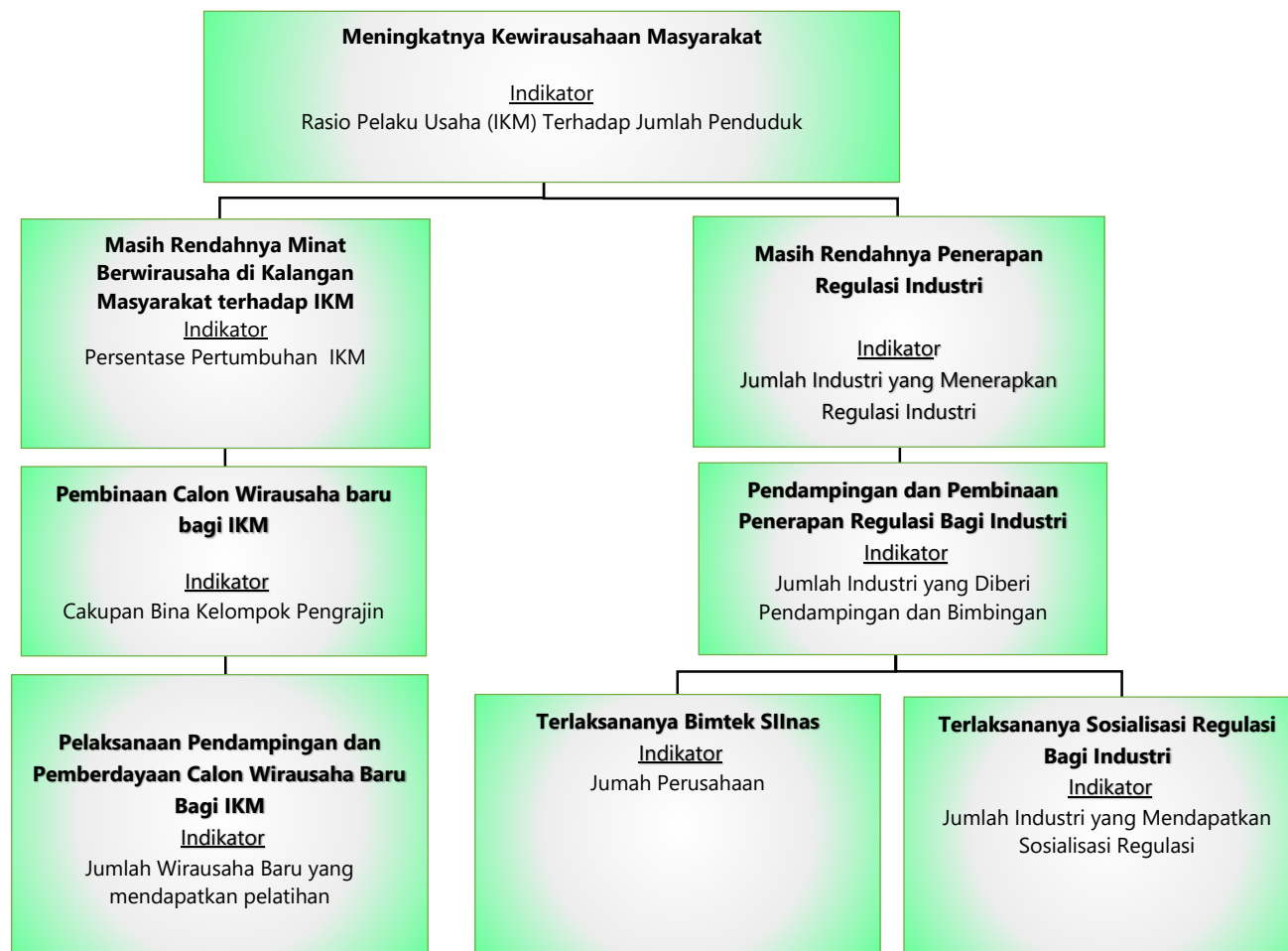
Koordinasi dan Konsultasi Perusahaan CPML
Indikator
Jumlah Perusahaan CPML

Penyelenggaraan Job fair
Indikator
Jumlah Pencaker yang Mendaftar Pada job fair

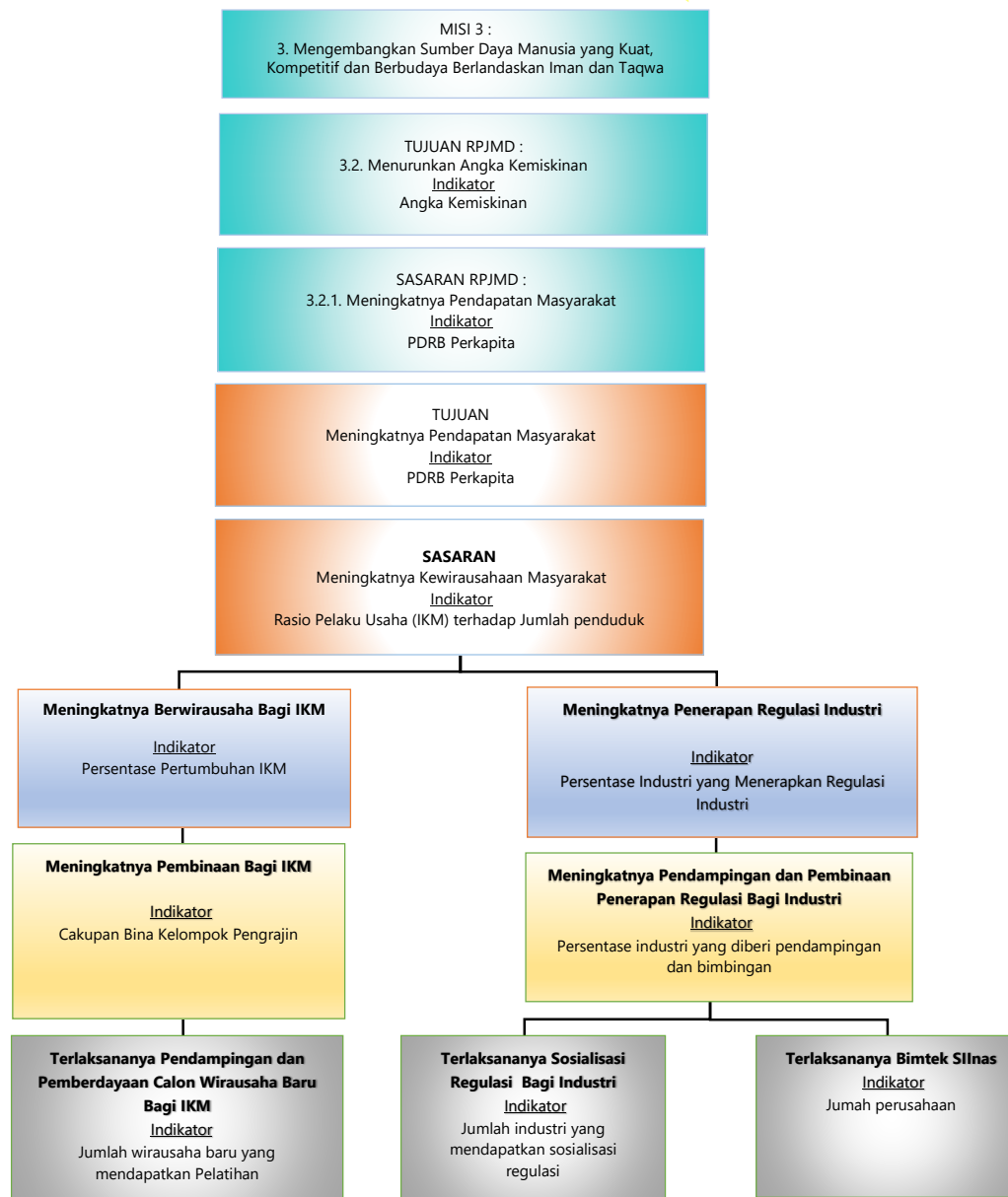
Pendataan Sarana Hubungan Industrial
Indikator
Jumlah Dokumen

Pembinaan Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun
Indikator
Ditetapkannya UMK

MISI 3
POHON KINERJA
URUSAN PERINDUSTRIAN



MISI 3
CASCADING
URUSAN PERINDUSTRIAN

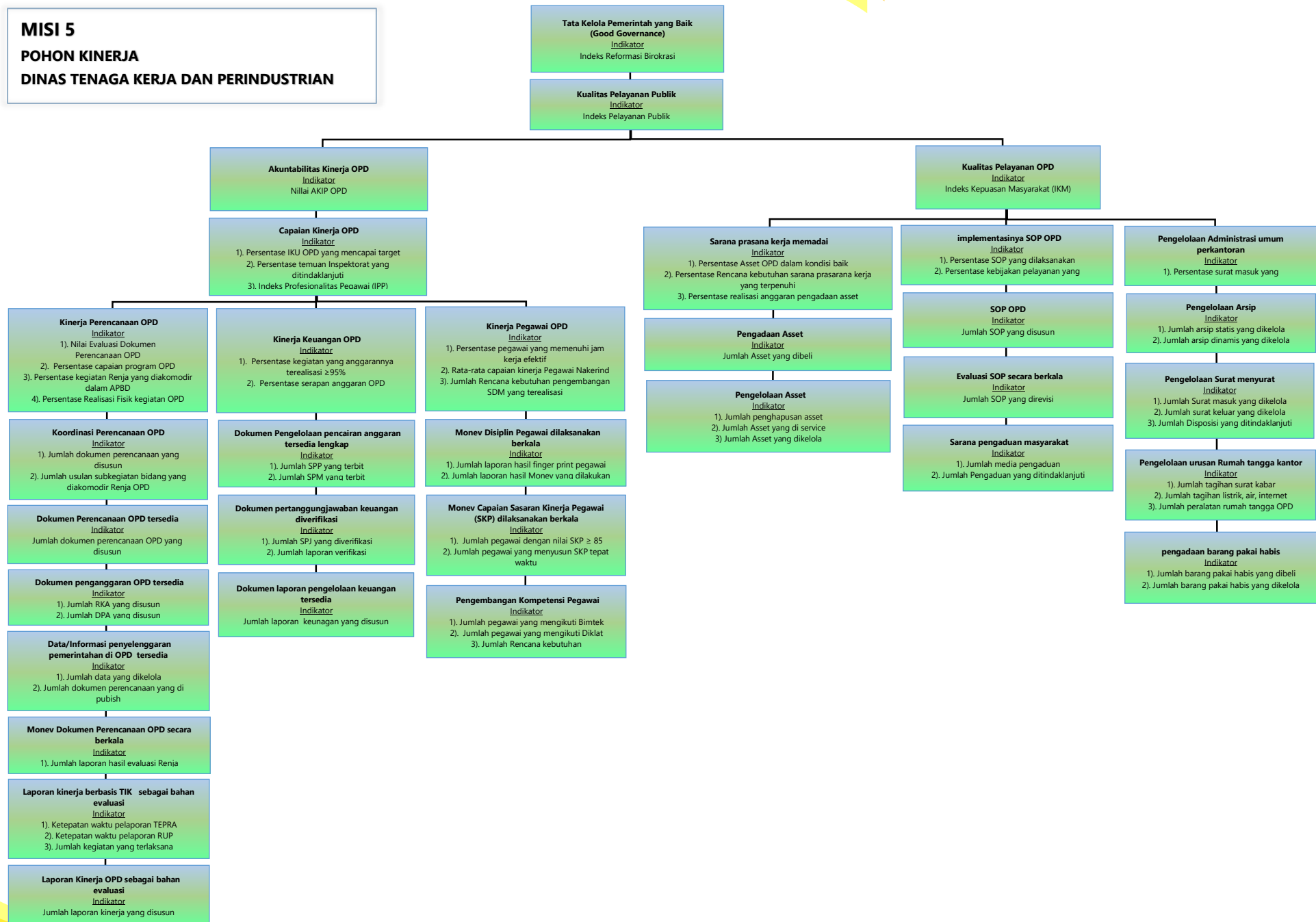


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

MISI 5

POHON KINERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

MISI 5

CASCADING

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

MISI 5 :
5. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul

TUJUAN RPJMD :
5.1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK
(GOOD GOVERNMENT)
Indikator
Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN RPJMD :
5.1.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator
Indeks Pelayanan Publik

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD
Indikator
Nilai AKIP OPD

Meningkatnya Capaian Kinerja OPD

- Indikator
- 1). Persentase IKU OPD yang mencapai target
 - 2). Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti
 - 3). Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)

Meningkatnya Kinerja Perencanaan OPD

- Indikator
- 1). Nilai Evaluasi Dokumen Perencanaan OPD
 - 2). Persentase capaian program OPD
 - 3). Persentase kegiatan Renja yang diakomodir dalam APBD
 - 4). Persentase Realisasi Fisik kegiatan OPD

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan OPD

- Indikator
- 1). Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
 - 2). Jumlah usulan subkegiatan bidang yang diakomodir Renja OPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD

Indikator
Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun

Tersedianya Dokumen penganggaran OPD

- Indikator
- 1). Jumlah RKA yang disusun
 - 2). Jumlah DPA yang disusun

Tersedianya Data/informasi penyelenggaraan pemerintahan di OPD

- Indikator
- 1). Jumlah data yang dikelola
 - 2). Jumlah dokumen perencanaan yang di publish

Terlaksananya Monev Dokumen Perencanaan OPD secara berkala

- Indikator
- 1). Jumlah laporan hasil evaluasi Renja
 - 2). Jumlah laporan hasil Reviu Renstra

Tersedianya Laporan kinerja berbasis TIK sebagai bahan evaluasi

- Indikator
- 1). Ketepatan waktu pelaporan TEPR
 - 2). Ketepatan waktu pelaporan RUP
 - 3). Jumlah kegiatan yang terlaksana

Tersedianya Laporan Kinerja OPD sebagai bahan evaluasi

Indikator
Jumlah laporan kinerja yang disusun

Meningkatnya Kinerja Keuangan OPD

- Indikator
- 1). Persentase kegiatan yang anggarannya terealisasi $\geq 95\%$
 - 2). Persentase serapan anggaran OPD

Tersedianya Dokumen Pengelolaan pencairan anggaran lengkap

- Indikator
- 1). Jumlah SPP yang terbit
 - 2). Jumlah SPM yang terbit

Terlaksananya Dokumen pertanggungjawaban keuangan diverifikasi

- Indikator
- 1). Jumlah SPJ yang diverifikasi
 - 2). Jumlah laporan verifikasi

Tersedianya Dokumen laporan pengelolaan keuangan

Indikator
Jumlah laporan keuangan yang disusun

Meningkatnya Kinerja Pegawai OPD

- Indikator
- 1). Persentase pegawai yang memenuhi jam kerja efektif
 - 2). Rata-rata capaian kinerja Pegawai Nakerind
 - 3). Jumlah Rencana kebutuhan pengembangan SDM yang terealisasi

Terlaksananya Monev Disiplin Pegawai berkala

- Indikator
- 1). Jumlah laporan hasil finger print pegawai
 - 2). Jumlah laporan hasil Monev yang dilakukan

Terlaksananya Monev Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berkala

- Indikator
- 1). Jumlah pegawai dengan nilai SKP ≥ 85
 - 2). Jumlah pegawai yang menyusun SKP tepat waktu
 - 3). Jumlah kegiatan monev yang dilakukan

Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai

- Indikator
- 1). Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
 - 2). Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat

Tersedianya Sarana prasana kerja memadai

- Indikator
- 1). Persentase Asset OPD dalam kondisi baik
 - 2). Persentase Rencana kebutuhan sarana prasarana kerja yang terpenuhi
 - 3). Persentase realisasi anggaran pengadaan asset

Terlaksananya Pengadaan Asset

Indikator
Jumlah Asset yang dibeli

Meningkatnya Pengelolaan Asset

- Indikator
- 1). Jumlah penghapusan asset
 - 2). Jumlah Asset yang di service
 - 3). Jumlah Asset yang dikelola

Terimplementasinya SOP OPD

- Indikator
- 1). Persentase SOP yang dilaksanakan
 - 2). Persentase kebijakan pelayanan yang disosialisasikan

Tersedianya SOP OPD

Indikator
Jumlah SOP yang disusun

Terlaksananya evaluasi SOP secara berkala

Indikator
Jumlah SOP yang direvisi

Tersedianya Sarana pengaduan masyarakat

- Indikator
- 1). Jumlah media pengaduan
 - 2). Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti

Terlaksananya Pengelolaan Surat menyurat

- Indikator
- 1). Jumlah Surat masuk yang dikelola
 - 2). Jumlah surat keluar yang dikelola
 - 3). Jumlah Disposisi yang ditindaklanjuti

Terlaksananya Pengelolaan urusan Rumah tangga kantor

- Indikator
- 1). Jumlah tagihan surat kabar
 - 2). Jumlah tagihan listrik, air, internet
 - 3). Jumlah peralatan rumah tangga OPD yang dibeli

Terlaksananya pengadaan barang pakai habis

- Indikator
- 1). Jumlah barang pakai habis yang dibeli
 - 2). Jumlah barang pakai habis yang dikelola

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi umum perkantoran

- Indikator
- 1). Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti
 - 2). Persentase dokumen yang diarsip sesuai aturan

Terlaksananya Pengelolaan Arsip

- Indikator
- 1). Jumlah arsip statis yang dikelola
 - 2). Jumlah arsip dinamis yang dikelola

Terlaksananya Pengelolaan Surat menyurat

- Indikator
- 1). Jumlah Surat masuk yang dikelola
 - 2). Jumlah surat keluar yang dikelola
 - 3). Jumlah Disposisi yang ditindaklanjuti

Terlaksananya Pengelolaan urusan Rumah tangga kantor

- Indikator
- 1). Jumlah tagihan surat kabar
 - 2). Jumlah tagihan listrik, air, internet
 - 3). Jumlah peralatan rumah tangga OPD yang dibeli

Terlaksananya pengadaan barang pakai habis

- Indikator
- 1). Jumlah barang pakai habis yang dibeli
 - 2). Jumlah barang pakai habis yang dikelola